



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	241.465.156.207
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	194.151.886.133
1.1.1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	98.987.006.108
1.1.2	Kementerian Agama	62.305.595.383
1.1.3	Kementerian Keuangan	3.244.680.762
1.1.4	Kementerian Pertanian	257.806.612
1.1.5	Kementerian Perindustrian	959.373.967
1.1.6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	120.143.725
1.1.7	Kementerian Perhubungan	2.404.150.134
1.1.8	Kementerian Kesehatan	2.302.739.356
1.1.9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	126.273.160
1.1.10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	192.951.492
1.1.11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.064.731.527
1.1.12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	435.492.943
1.1.13	Kementerian Pertahanan	2.888.677.643
1.1.14	Kementerian Ketenagakerjaan	1.195.928.600
1.1.15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	463.740.424
1.1.16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.600.000
1.1.17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	145.822.395
1.1.18	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.367.022.644
1.1.19	Kementerian Perdagangan	15.684.758
1.1.20	Kepolisian Negara Republik Indonesia	500.000.000
1.1.21	Kementerian Sosial	12.023.664.500
1.1.22	Badan Intelijen Negara	500.000.000
1.1.23	Kejaksaan Republik Indonesia	500.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	ALOKASI
1.1.24	Badan Riset dan Inovasi Nasional	32.800.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	47.313.270.074
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	346.558.708.175
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.520.091
2.2	Dana Alokasi Khusus	132.135.766.740
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000
2.2.2	DAK Nonfisik	116.315.466.740
2.2.2.1	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.493.556.448
2.2.2.2	Tunjangan Guru ASN Daerah	56.651.935.292
2.2.2.3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.245.421.344
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	77.000.000.000
3.1	Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	15.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	52.000.000.000
	Jumlah	665.023.864.382

Keterangan:

Rincian Anggaran Pendidikan belum termasuk pergeseran fungsi pendidikan pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga sesuai hasil penelaahan RKA-K/L setelah pengesahan APBN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

yang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Leona Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
A. Pembiayaan Utang	648.085.453.720
I. Surat Berharga Negara (Neto)	666.447.881.732
II. Pinjaman (Neto)	(18.362.428.012)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	(636.230.414)
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.258.429.586
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(3.894.660.000)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(17.726.197.598)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	67.751.162.402
i. Pinjaman Tunai	30.000.000.000
ii. Pinjaman Kegiatan	37.751.162.402
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	33.579.249.950
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	33.249.644.373
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	329.605.577
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	4.171.912.452
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(85.477.360.000)
B. Pembiayaan Investasi	(176.216.040.000)
I. Klaster Infrastruktur	(55.215.000.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)	(18.604.000.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.891.000.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PT Wijaya Karya Tbk (Persero)	(6.000.000.000)
4. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(15.000.000.000)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(13.720.000.000)
II. Klaster Pendidikan	(25.000.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(25.000.000.000)
a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	(15.000.000.000)
b. Dana Abadi Penelitian	(4.000.000.000)
c. Dana Abadi Kebudayaan	(2.000.000.000)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	(4.000.000.000)
III. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(1.212.670.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Rehabilitasi Mangrove	(1.212.670.000)
IV. Klaster Kerja Sama Internasional	(1.907.140.000)
1. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1.531.210.000)
2. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(59.600.000)
3. Investasi kepada International Development Association (IDA)	(316.330.000)
V. Klaster Lainnya	(92.881.230.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) (Persero)	(3.556.000.000)
2. Penyertaan Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero)	(649.230.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10.000.000.000)
4. Pembiayaan Pendidikan	(52.000.000.000)
5. Cadangan Pembiayaan Investasi	(13.676.000.000)
6. Cadangan Pembiayaan Lainnya	(13.000.000.000)
C. Pemberian Pinjaman	(250.652.452)
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	(250.652.452)
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(4.171.912.452)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

**RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	3.921.260.000
D. Kewajiban Penjaminan	(823.986.000)
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(823.986.000)
1. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(681.543.000)
2. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(55.492.000)
3. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(25.444.000)
4. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(61.507.000)
E. Pembiayaan Lainnya	52.030.230.000
I. Saldo Anggaran Lebih	51.381.000.000
II. Hasil Pengelolaan Aset	649.230.000
JUMLAH	522.825.005.268

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Liliana Djaman